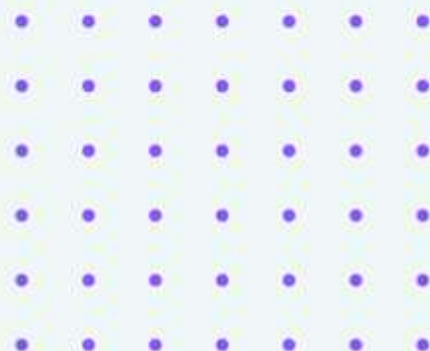




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI FAKFAK



www.pn-fakfak.go.id

pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Jl. Yos Sudarso N0.92 Wagom-Fakfak

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2025.

Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan Tahun 2025 ini masih belum sempurna dari tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas kerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak kedepan.

Fakfak, 31 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.

DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum

NIP: 19770331 200212 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB. I PENDAHULUAN	7
BAB. II A. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK	12
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	13
B. PENYELESAIAN PERKARA	13
- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	14
- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	15
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK	15
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	15
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	15
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	15
- Posbakum (Satker Yang Mendapatkan Alokasi Dan Realisasi Anggaran)	16
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	18
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	18
BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA	19
	3

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN	
A. Mutasi	21
B. Promosi	23
C. Pensiun	24
D. Diklat(SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	24
BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	30
A. Pengelolaan Keuangan	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	38
C. Pengelolaan Teknologi Infomasi	43
BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	53
A. Akreditasi Penjamin Mutu	53
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	56
C. Inovasi Pelayanan Publik	62
BAB VI. PENGAWASAN	76
A. Internal	76
B. Evaluasi	81
BAB VII. PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	82

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.1.1 Perkara Pidana Tahun 2025	12
Tabel II.1.1.2 Perkara Perdata Tahun 2025	12
Tabel II.1.2.1 Perkara tingkat banding	13
Tabel II.1.3.1 Perkara tingkat kasasi	13
Tabel II.1.4.1 Perkara Peninjauan kembali	13
Tabel II.2.1.1 Jumlah diputus tepat waktu	14
Tabel II.2.2.1 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	14
Tabel II.2.3.1 Perkara yang berhasil di restoratif	14
Tabel II.2.4.1 Perkara yang berhasil di mediasi	14
Tabel II.2.5.1 Jumlah Perkara anak yang berhasil diversi	15
Tabel II.2.6.1 Perkara Perdata yang menggunakan e-Court	15
Tabel II.2.6.1 Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik	15
Tabel II.2.6.1 Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	15
Tabel II.3.3.1 Pelayanan Posbakum	16
Tabel II.3.3.2 Perkara Prodeo	18
Tabel III.1. Data Pegawai	19
Tabel III.2. Data Tenaga Honorer	21
Tabel III.3. Kebutuhan Pegawai	21
Tabel III.1.1 Mutasi Keluar Tahun 2025	22
Tabel III.1.2 Mutasi Masuk Tahun 2025	22
Tabel III.2.1 Promosi Naik Pangkat	23
Tabel III.2.2 Kenaikan Gaji Berkala	24
Tabel III.2.3 Promosi Jabatan	24
Tabel III.4.1 Daftar Diklat Pegawai	24
Tabel IV.1.1.1 Realisasi Belanja Pegawai	33
Tabel IV.1.1.2 Realisasi Belanja Barang Operasional	34
Tabel IV.1.1.3 Realisasi Belanja Modal	35
Tabel IV.1.2.1 Realisasi Belanja DIPA 03	37
Tabel IV.1.3.1.1 Realisasi PNPB DIPA 01	37
Tabel IV.1.3.1.2 Realisasi PNPB DIPA 03	37

Tabel IV.2.1.1 Pengadaan Sarana & Prasarana	39
Tabel IV.2.2.1 Tanah dan bangunan gedung kantor	39
Tabel IV.2.2.2 Rumah dinas	39
Tabel IV.2.3.1 Kendaraan Dinas	40
Tabel IV.2.3.2 Sarana & Prasarana	40
Tabel IV.3.1 Perangkat pendukung e-court	52
Tabel IV.3.2 Perkara Pengguna e-court Pengadilan Negeri Fakfak	52
Tabel IV.3.2.1 Perangkat pendukung SIPP	55
Tabel V.3.1.1 Fasilitas layanan informasi	70
Tabel V.3.2.1 Petugas PTSP	70
Tabel V.3.4.1 Data pelayanan informasi public	71
Tabel V.3.5.1 Data penyelesaian sengketa informasi	72
Tabel V.3.6.1 Data pelayanan pengaduan	73

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa sasaran Bidang Hukum adalah terwujudnya sistem Hukum Nasional yang menjamin tegaknya supremasi Hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah guna menciptakan GOOD GOVERNMENT dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan sangat urgent untuk dikedepankan sehingga praktek peradilan dan penampilan peradilan akan semakin tertib, handal, jujur, berwibawa dan bermartabat dimata publik.

Kekuasaan Badan Peradilan adalah Kekuasaan Negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya. Diantaranya adalah Badan Peradilan Umum yang pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan salah satu bagian dari Pengadilan Tinggi Papua Barat. Seiring dengan pemekaran Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat maka Pengadilan Negeri Fakfak harus segera melakukan Kebijakan Strategis, Peningkatan Kinerja, Pembenahan Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Anggaran maupun Pembangunan Infrastruktur pada Pengadilan Negeri Fakfak mengingat secara geografis sangat berbeda dengan daerah lain sehingga harus didukung dengan sarana transportasi udara yang sangat Dominan digunakan yang mengakibatkan biaya tinggi.

Adapun Pengadilan Negeri Fakfak berada dibagian Provinsi Papua Barat dan berkedudukan di Jalan Yos Sudarso nomor 92 Fakfak Papua Barat. Dengan Wilayah Hukum mencakup keseluruhan Kabupaten Fakfak.

B. VISI DAN MISI.

1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Fakfak adalah :

“Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung”.

2. MISI

PENGADILAN NEGERI FAKFAK mengemban Misi :

- MENJAGA INTEGRITAS DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.
- MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.
- MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.
- MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.

3. MOTTO

Pengadilan Negeri Fakfak Klas II memiliki Motto:

“ BISA TERBINA”.

BERWIBAWA INTEGRITAS SANTUN ADIL TERTIB BERSIH

INOVATIF AMANAH

4. KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Fakfak adalah pernyataan komitmen pimpinan untuk memastikan bahwa proses implementasi sistem manajemen mutu di Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan sasaran mutu organisasi, serta memenuhi persyaratan mutu dan berupaya secara berkelanjutan memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu.

Kebijakan manajemen Mutu Pengadilan Negeri Fakfak :

1. Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2. Memberikan Kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan negeri Fakfak.
5. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengadilan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

C. RENCANA STRATEGIS.

Sebagai tindak lanjut dari Visi dan Misi Pengadilan Negeri Fakfak, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat arah kebijakan strategis, kebijaksanaan, program kerja, serta kegiatan tahunan. Renstra ini disusun secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Renstra selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan kerja, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan guna penyempurnaan program pada periode berikutnya agar lebih efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran.

Sejalan dengan tuntutan publik terhadap supremasi hukum, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Pengadilan Negeri Fakfak memerlukan suatu Rencana Strategis yang komprehensif sebagai kerangka acuan dalam mewujudkan cita-cita hukum yang menjadi harapan masyarakat. Cita-cita tersebut mencakup terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan melalui peningkatan kepastian hukum, terjaminnya akses bagi setiap pencari keadilan untuk menjangkau badan peradilan, serta meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak mampu memberikan pelayanan peradilan dan kepastian hukum secara profesional. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pula ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan aspek-aspek fundamental, yaitu perkembangan hukum, kondisi sosial masyarakat Fakfak, kondisi internal Pengadilan Negeri Fakfak, serta dinamika hukum dan kebijakan nasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Renstra Pengadilan Negeri Fakfak diarahkan untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara, memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Seluruh sasaran tersebut dijabarkan dalam kajian kegiatan yang disusun secara sistematis dan terakumulasi dalam tahapan kegiatan tahunan yang terinci dan berkesinambungan untuk jangka waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Fakfak secara optimal dan berkelanjutan.

A. Tujuan Pengadilan Negeri Fakfak

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan Merasa Kebutuhan dan Kepuasannya terpenuhi (meningkatkan kepastian hukum).
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan public bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang professional.

B. Sasaran Strategis

Adapun Penjabaran dari tujuan terukur, yaitu semua yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses perdilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2

BAB II

KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Fakfak

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Negeri Fakfak yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka selama tahun 2025 baik Perkara Perdata maupun Perkara Pidana yang diproses di Pengadilan Negeri Fakfak dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

❖ Perkara Pidana Tahun 2025

Tabel II.1.1.1 Perkara Pidana Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Perkara Pidana				Ket
		Sisa 2024	Masuk	Putus	Sisa	
1.	Perkara Pidana Biasa	12	65	74	3	
2.	Perkara Pidana Anak	-	11	10	-	
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	-	3	3	-	
4.	Pra Peradilan (Prapid)	-	-	-	-	
5.	Penyitaan	-	136	-	-	
6.	Pengeledahan	-	5	-	-	

❖ Perkara Perdata Tahun 2025

Tabel II.1.1.2 Perkara Perdata Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Perkara Perdata					Ket
		Sisa 2024	Masuk	Putus	Cabut	Sisa	
1.	Perkara Perdata Gugatan	1	13	11	-	3	
2.	Perkara Perdata Permohonan	-	65	65	-	-	
3.	Perkara Gugatan Sederhana	-	5	5	-	-	
4.	Gugatan /Bantahan	-	2	2	-	-	

2. Keadaan Perkara tingkat Banding

Tabel II.1.2.1 Perkara tingkat banding

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding
1.	Perkara tingkat Banding	1	14	15	15

3. Keadaan Perkara tingkat Kasasi

Tabel II.1.3.1 Perkara tingkat kasasi

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1.	Perkara tingkat Kasasi	-	10	10	10

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Tabel II.1.4.1 Perkara Peninjauan kembali

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum
1.	Perkara tingkat Peninjauan Kembali	-	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu

Tabel II.2.1.1 Jumlah diputus tepat waktu

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025	Perkara yang diputus tepat Waktu Tahun 2025
1.	Perkara Pidana	88	87
2.	Perkara Perdata	85	83

2. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Tabel II.2.2.1 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

NO.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			
		Perdata	Pidana	Jumlah	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
1.	Putusan Perkara:				
	- Banding	82	73	155	155
	- Kasasi	83	77	160	160
	- PK	83	87	170	170

3. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif

Tabel II.2.3.1 Perkara Pidana yang berhasil di Restoratif

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Restoratif Tahun 2025	Jumlah Perkara yang berhasil Restoratif Tahun 2025
1.	Perkara Pidana	-	-

4. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Tabel II.2.4.1 Perkara yang berhasil mediasi

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2025	Jumlah Perkara yang berhasil Mediasi Tahun 2025
1.	Perkara Perdata	5	-

5. Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Tabel II.2.5.1 Perkara perdata yang berhasil Diversi

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversi Tahun 2025
1.	Perkara Perdata	11	2

6. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

Tabel II.2.6.1 Perkara perdata yang menggunakan e-Court

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Gugatan	15
2.	Gugatan Sederhana	5
3.	Permohonan	65
4.	e-Litigasi	7

7. Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Tabel II.2.7.1 Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik

No	Jenis Perkara	Jumlah pelimpahan Perkara Pidana yang e-Berpadu	Jumlah pelimpahan Perkara Pidana yang Tidak menggunakan e-Berpadu
1.	Perkara Pidana Biasa	61	4
2.	Perkara Pidana Anak	11	-
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	-	3
4.	Pra Peradilan (Prapid)	-	-
5.	Penyitaan	136	-
6.	Pengeledahan	5	-
7.	Perkara Banding	8	6

8. Layanan Perkara Pidana Yang diajukan Secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel II.2.8.1 Layanan Perkara Pidana Yang diajukan Secara elektronik (e-Berpadu)

No	Jenis Perkara	Layanan Perkara Pidana Yang diajukan secara elektronik	Layanan Perkara Pidana Yang diajukan secara elektronik
1.	Perkara Pidana Biasa	61	4
2.	Perkara Pidana Anak	11	-
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	-	3
4.	Pra Peradilan (Prapid)	-	-
5.	Penyitaan	136	-
6.	Pengeledahan	5	-
7.	Perkara Banding	8	6

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum. Dalam tahun Anggaran 2025, dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **Rp. 29.500.000,- (Dua puluh Sembilan juta Lima ratus ribu rupiah)** untuk 1 Tahun, dengan penyerapan anggaran mencapai

100%. Pada awal tahun 2025 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan/ MOU dari pihak Pengadilan Negeri Fakfak dan Pihak Advokad untuk mendukung dan mensukseskan layanan tersebut.



Tabel II.3.3.1 Pelayanan Posbakum

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Posbakum
1.	Tamu Posbakum	85



Untuk mendukung kegiatan Pos Bantuan Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menyediakan akses informasi berupa selebaran/flyer, banner serta jadwal dan foto dari Petugas piket Pos Bantuan Hukum untuk menginformasikan tentang fasilitas tersebut

kepada para pencari keadilan dan pengguna Layanan Publik pada Pengadilan Negeri Fakfak.

Kemudian untuk memantau kinerja dari Posbakum. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas bagian Hukum para pemangku kepentingan melakukan rapat Evaluasi Kinerja dari Posbakum



Gambar II.3.2 rapat evaluasi Posbakum



Gambar II.3.3 rapat evaluasi Posbakum

2. Sidang keliling / Pelayanan Terpadu

Sesuai dengan Misi Pengadilan Negeri Fakfak yaitu memberikan Pelayanan Hukum yang inovatif dan berkeadilan kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Fakfak pada Tahun 2025 tidak melaksanakan kegiatan Sidang Keliling pelayanan terpadu.

3. Perkara Prodeo

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Tabel II.3.3.2 Perkara Prodeo

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Prodeo Tahun 2025	Perkara yang diputus Tahun 2025
1.	Permohonan	3	3

3

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sehingga perlu dipacu dan didorong lewat pendidikan dan pelatihan secara simultan. Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2025 sebanyak: 21 (Dua Puluh Satu) orang pegawai, 9 (Sembilan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 (Dua) tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Beberapa jabatan masih dirangkap oleh beberapa orang untuk jalannya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Fakfak.

Tabel III.1. Data Pegawai

No	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1	Ketua : Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum	IV/b	
2	Wakil Ketua : -	-	-
3	Hakim : 1. Fitra Faraouky Lubis, S.H. 2. Mahendra Wirasakti, S.H. 3. Girian Aji, S.H. 4. Rangga Rio Admi, S.H. 5. Abednego, S.H., M.H.	III/a III/a III/a III/a III/a	
4	Panitera: Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., M.H.	IV/a	-
5	Panitera Muda Perdata: Agusthina Lenora Keda, S.H. Staf : 1. Yulian Riski Ananda, A.Md.A.B. Staf : 2. Febrian Widyarsa, A.Md.M. Staf : 3. Yeni Anggraini, S.Sos.	III/b II/d II/c IX	Panmud Perdata Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
6	Panitera Muda Pidana: Salmuna Staf : 1. Arandy Achmad Tundribali, S.H	III/b III/a	Panmud Pidana

	Staf : 2. Yanuar Eka Prasetya, A.Md.M.	II/c	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
	Staf : 3. Robertho Revellino Tawirasaru, S.H.	IX	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
7	Panitera Muda Hukum: - Staf : 1. Doni Riyanta, A.Md.M. Staf : 2. Oktoviana Tidora Watto, S.H.	II/c IX	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
8	Panitera Pengganti: Irianto Tanggahma, S.H	III/b	Diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Pidana
9	Jurusita / Jurusita Pengganti: 1. Ismet Wairoy, S.H. 2. Johanis M. Rahadat	III/b II/c	Diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Hukum Diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Hukum
No	TENAGA NON TEKNIS	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1	Sekretaris : Yurice J.C Rembet, S.T	III/d	
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana : - Staf : 1. Asri wali, S.H.I. Staf : 2. Juniar Patimbang, A.Md	IX VII	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
3	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : - Staf : 1. Ade Renaldi, A.Md. Staf : 2. Rika Mustika Sari, S.H.	VII IX	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
4	Kasubag Umum dan Keuangan : Rizal Asbar, S.H. Staf : 1. Muhammad Resky Ridwan, A.Md.A.B Staf : 2. Dahlan Silitonga, S.H . Staf : 3. Thomas Wiratraur, S.H. Staf : 4. Ratna Keley, A.Md.	III/c II/c III/a IX VII	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran Diperbantukan sebagai Bendahara Penerima PNB Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tabel III.2. Data Tenaga Honorer

No	TENAGA HONORER	T. M. T.	KETERANGAN
1.	Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H	29 – 03 – 2021 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Hukum
2.	Beato Aprillio Sirwutubun, A.Md	22 – 01 – 2024 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian PTIP.

Tabel III.3. Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Kebutuhan	Yang Ada	Kekurangan
1.	Staf Kepaniteraan Pidana	4	3	1
2.	Staf Kepaniteraan Perdata	4	2	2
3.	Staf Kepaniteraan Hukum	4	2	2
4.	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	4	2	2
5.	Staf Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana	2	2	0
6.	Staf Subbag Umum dan Keuangan	4	4	0
7.	Fungsional Arsiparis	2	0	2
8.	Fungsional Pustakawan	2	0	2
9.	Fungsional Pranata komputer	2	0	2
10.	Fungsional Bendahara	2	0	2
11.	Jurusita / Jurusita Pengganti	3	2	1
12.	Panitera Pengganti	2	1	1
13.	Panitera Muda Pidana	1	1	0
14.	Panitera Muda Perdata	1	1	0
15.	Panitera Muda Hukum	1	0	1
16.	Kasubag Umum dan Keuangan	1	1	0
17.	Kasubag Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana	1	0	1
18.	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	0	1
19.	Sekretaris	1	1	0
20.	Panitera	1	1	0
21.	Hakim	5	5	0
22.	Wakil Ketua	1	0	1
23.	Ketua	1	1	0

A. Mutasi

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional maupun Nasional.

Tabel III.1.1 Mutasi Keluar Tahun 2025

No	Nama	Jabatan Baru	Jabatan Lama	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	Reynold S.E.M.P Nababan, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Klas II	Hakim Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 Tanggal : 4 Juli 2025	4 Agustus 2025
2.	Iranda Careca Anindityo, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Selong Klas I.B.	Hakim Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 Tanggal : 4 Juli 2025	1 Agustus 2025
3.	Ganjar Prima Anggara, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Klas II	Hakim Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 Tanggal : 4 Juli 2025	4 Agustus 2025
4.	Ivan Bhakti Yudistira, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Klas I.B.	Hakim Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 Tanggal : 4 Juli 2025	4 Agustus 2025
5.	Yahya Muhaymin Hatta, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Polewari Klas I.B.	Hakim Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 Tanggal : 4 Juli 2025	4 Agustus 2025
6.	Randy Marchel Sohilaht	Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Kleas I.A.	Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal : 12 Agustus 2025	14 September 2025
7.	Edwin Tapilaatu, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Sengkang	Panitera Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1658/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2025 Tanggal : 6 November 2025	31 Desember 2025

Tabel III.1.2 Mutasi Masuk Tahun 2025

No	Nama	Jabatan Baru	Jabatan Lama	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	Agusthina Lenora Keda, S.H.	Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Fakfak	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong	Nomor : 1105/DJU/SK/KP4.1.3/X/2024 Tanggal : 18 Oktober 2024	13 Januari 2025
2.	Fitra Faraouky Lubis, S.H.	Hakim Pratama Pengadilan Negeri Fakfak	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Karawang	Nomor : 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal : 12 Juni 2025	23 Juni 2025
3.	Rangga Rio Admi, S.H.	Hakim Pratama Pengadilan Negeri Fakfak	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Tulungagung	Nomor : 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal : 12 Juni 2025	23 Juni 2025

4.	Mahendra Wirasakti, S.H.	Hakim Pratama Pengadilan Negeri Fakfak	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Palu	Nomor : 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal : 12 Juni 2025	23 Juni 2025
5.	Girian Aji, S.H.	Hakim Pratama Pengadilan Negeri Fakfak	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Gresik	Nomor : 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal : 12 Juni 2025	23 Juni 2025
6.	Abednego, S.H.	Hakim Pratama Pengadilan Negeri Fakfak	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Nomor : 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 Tanggal : 12 Juni 2025	23 Juni 2025
7.	Dahlan Silitonga, S.T.	Teknisi Sarana Dan Prasarana Pengadilan Negeri Fakfak (CPNS)	-	Nomor : 2761/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 Tanggal : 21 Mei 2025	1 Juni 2025
8.	Yanuar Eka Prasetya, A.Md.M.	Dokumentalis Hukum (CPNS)	-	Nomor : 1587/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 Tanggal : 21 Mei 2025	23 Juni 2025
9.	Doni Riyanta, A.Md.Kom.	Dokumentalis Hukum (CPNS)	-	Nomor : 2142/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 Tanggal : 21 Mei 2025	23 Juni 2025
10.	Febrian Widyarsa, A.Md.M.	Dokumentalis Hukum (CPNS)	-	Nomor : 1430/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 Tanggal : 21 Mei 2025	23 Juni 2025

B. Promosi

Selain itu mutasi diartikan pula sebagai promosi yang dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengalaman, kejujuran serta syarat-syarat objektif lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS).

Tabel III.2.1 Promosi Naik Pangkat

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Pangkat/Golongan Baru	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	Rizal Asbar, S.H./ III/b/ 198103302014051001	III/c / Penata	96/KPT.W31- U/SK.KP2.1.1/VIII/2025 26 Agustus 2025	1 Oktober 2025
2.	Edwin Tapilatu, S. Sos, S.H., M.H./ III/d / 196905241990031004	IV/a / Pembina	1229/DJU/SK.KP2.1.1/VIII/2025 27 Agustus 2025	1 Oktober 2025

Tabel III.2.2. Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.	Penata Tk I / III/d	1027/KPN.W31.U3/KP2.1.2/XI/2024 Tanggal 25 November 2024	1 Januari 2025
2	Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., M.H.	Penata Tk I / III/d	176/KPN.W31-U3/KP2.1.2/II/2025 Tanggal 11 Februari 2025	1 Maret 2025
3	Agusthina Lenora Keda, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b	1198/KPN.W31-U3/KP2.1.2/X/2025 Tanggal 17 Oktober 2025	1 Desember 2025

Tabel III.2.3 Promosi Jabatan

No	Nama	Jabatan Baru	Jabatan Lama	Nomor SK & Tanggal Surat	TMT
1.	Salmuna	Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Fak-Fak	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Fak-Fak	Nomor : 1104/DJU/SK/KP4.1/3/X/2024 Tanggal : 18 Oktober 2024	13 Januari 2025
2.	Irianto Tanggahma, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Fakfak	Nomor : 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal : 12 Agustus 2025	29 Agustus 2025

C. Pensiun

Dalam Tahun 2025 tidak ada Aparatur yang memasuki masa Purnabakti/Pensiun.

D. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Selama tahun 2025 pegawai yang mengikuti Diklat Pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai Berikut:

Tabel III.4.1 Daftar Diklat Pegawai/Bimtek/Sosialisasi

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Sosialisasi Uji Kompetensi bagi seluruh Panitera Muda Pengadilan Tinggi dan Panmud Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum MA RI	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 14 Januari 2025	1. Salmuna 2. Agusthina Lenora Keda, S.H.
2	Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 14 Januari 2025	1. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. 2. Rizal Asbar, S.H.

	Milik Negara (BMN) Semester II dan Tahunan Tahun 2024 pada SIMAN v2.			
3	Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.5 dan Aplikasi e-BERPADU versi 4.0.0	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 23 Januari 2025	1. Dony Haardiyanto, S.H., M.Hum; 2. Iranda Careca Anindityo, S.H. 3. Ivan Bhakti Yudistira, S.H, 4. Edwin Tapilatu, S. Sos., S.H. 5. Agusthina Lenora Keda, S.H. 6. Ismet Wairoy. 7. Irianto Tanggahma, S.H. 8. Yulian Riski Ananda, A.Md.A.B. 9. Ade Renaldi, A.Md. 10. Beato Aprillio Sirwutubun, A.Md.
4	Sosialisasi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 24 Februari 2025	1. Iranda Careca Anindityo, S.H. 2. Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H. 3. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.
5	Sosialisasi Administrasi Register Hibah Melalui Aplikasi SEHATI	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 11 Maret 2025	Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.
6	Sosialisasi Aplikasi e-Monev Bappenas 2025	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 8 Mei 2025	1. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. 2. Rika Mustika Sari, S.H.
7	Sosialisasi <i>pengisian Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) bagi Hakim angkatan VIII dan Calon Hakim angkatan IX	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 9 Mei 2025	1. Dony Haardiyanto, S.H., M.Hum; 2. Iranda Careca Anindityo, S.H. 3. Ganjar Prima Anggara, S.H. 4. Ivan Bhakti Yudistira, S.H. 5. Yahya Muhyamin Hatta, S.H.
8	Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang IV secara <i>Distance Learning</i> Tahun 2025	Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	Tempat Kerja Masing-masing Tanggal 30 Juni sampai dengan 22 Desember 2025	1. Dahlan Silitonga, S.T. 2. Febrian Widyarsa, A.Md.M. 3. Doni Riyanta, A.Md.Kom. 4. Yanuar Eka Prasetya, A.Md.M.
9	Sosialisasi Petunjuk Teknis RKBMN Tahun Anggaran 2027	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 14 Juli 2025	1. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T, 2. Rizal Asbar, S.H. 3. Muhammad Resky Ridwan, A.Md.,A.B. 4. Dahlan Silitonga,

				S.T.
10	Sosialisasi tentang Peluang dan Pemanfaatan Rumah Subsidi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 21 Juli 2025	Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.
11	Bimbingan Tekns (Bimtek) Hakim Mediasi bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat TA -2025	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 5 Agustus 2025	1. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. 2. Firta Faraouky Lubis, S.H. 3. Rangga Rio Admi, S.H. 4. Mahendra Wirasakti, S.H. 5. Girian Aji, S.H. 6. Abednego, S.H. 7. Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H. 8. Salmuna 9. Ismet Wairoy, S.H. 10. Irianto Tanggahma, S.H. 11. Arandy Achmad Tundribali, S.H.
12	Bimbingan Teknis Tata Cara Penginputan Kewajiban Administrasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax dan Sosialisasi Rekon Laporan Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Fakfak	Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Fakfak Tanggal 21 Agustus 2025	1. Rizal Asbar, S.H. 2. Muhammad Resky Ridwan, A.Md.A.B.
13	Sosialisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 26 Agustus 2025	1. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. 2. Asri Wali, S.H.I. 3. Oktoviana T. Watto, S.H. 4. Rika Musika Sari, S.H. 5. Yeni Anggraini, S.Sos. 6. Robertho R. Tawirasaru, S.H. 7. Thomas Wiratraur, S.H. 8. Ratna Keley, A.Md.T. 9. Juniar Patimbang, A.Md. 10. Ade Renaldi, A.Md.
14	Sosialisasi Security Awareness	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Fakfak	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 18 September 2025	1. Rizal Asbar, S.H. 2. Muhammad Resky Ridwan, A.Md.,A.B. 3. Dahlan Silitonga, S.T.

15	sosialisasi hasil monev kesesuaian data penghuni rumah negara pada aplikasi SIMAN dengan potongan gaji	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 22 September 2025	1. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. 2. Rizal Asbar, S.H. 3. Muhammad Resky Ridwan, A.Md.,A.B. 4. Dahlan Silitonga, S.T.
16	Bimbingan Teknis Mediator secara Online (daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 25 Septembet 2025 Pembukaan, Tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 2 Oktober 2025 melalui aplikasi e-learning	1. Firta Faraouky Lubis, S.H. 2. Rangga Rio Admi, S.H. 3. Mahendra Wirasakti, S.H. 4. Girian Aji, S.H. 5. Abednego, S.H.
17	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia	Mahkamah Agung RI	Balairung Lt.1 Mahkamah Agung Tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2025	Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.
18	Sosialisasi Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung 2025-2029	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 6 Oktober 2025	1. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. 2. Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., M.H. 3. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. 4. Ade Renaldi, A.Md. 5. Beato Aprillio Sirwutubun, A.Md.
19	Sosialisasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dilingkungan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan 15 Oktober 2025	1. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. 2. Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., M.H. 3. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S..T. 4. Ade Renaldi, A.Md. 5. Rika Mustika Sari, S.H. 6. Ratna Keley, A.Md. 7. Beato Aprillio Sirwutubun, A.Md.
20	Sosialisasi Fitur Standarisasi dan Evaluasi PengadaanMenu Pengadaan Barang pada Aplikasi e-Sadewa	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 16 Oktober 2025	1. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. 2. Rizal Asbar, S.H. 3. Dahlan Silitonga, S.T.
21	Pemanggilan Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 5	Badan Strajak Dikiat Kumdil MA RI	Satuan Kerja Masing-Masing denga metode <i>blended learning</i> Tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan 5 November 2025	1. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. 2. Mahendra Wirasakti, S.H.

22	Pemanggilan Diklat Orientasi MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Satuan Kerja Masing-Masing dengan metode <i>Distance Learning</i> Tanggal 3 November 2025 sampai dengan 19 November 2025	1. Asri Wali, S.H.I. 2. Oktoviana T. Watto, S.H. 3. Rika Musika Sari, S.H. 4. Yeni Anggraini, S.Sos. 5. Robertho R. Tawirasaru, S.H. 6. Thomas Wiratraur, S.H. 7. Ratna Keley, A.Md.T. 8. Juniar Patimbang, A.Md. 9. Ade Renaldi, A.Md.
23	Pemanggilan Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan Lingkungan Badan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI	Tempat tugas masing-masing dengan metode online Tanggal 17 November 2025 sampai dengan 21 November 2025	Mahendra Wirasakti, S.H,
24	Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 6.0.1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 18 November 2025	1. Fitra Faraouky Lubis, S.H. 2. Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T. 3. Ade Renald, A.Md. 4. Beato Aprillio Sirwutubun, A.Md.
25	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum PIdana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 6	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 24 November 2025 sampai dengan 28 November 2025	1. Abednego, S.H., M.H. 2. Rangga Rio Admi, S.H. 3. Fitra Faraouky Lubis, S.H. 4. Girian Aji, S.H.
26	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 27 November 2025	1. Asri Wali, S.H.I. 2. Oktoviana T. Watto, S.H. 3. Rika Musika Sari, S.H. 4. Yeni Anggraini, S.Sos. 5. Robertho R. Tawirasaru, S.H. 6. Thomas Wiratraur, S.H. 7. Ratna Keley, A.Md.T. 8. Juniar Patimbang, A.Md. 9. Ade Renaldi, A.Md.
27	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Tempat Tugas Masing-Masing dengan metode online learning Tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 5 Desember 2025;	Girian Aji, S.H.

28	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Kesekretariatan bagi Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia	Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI Tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan 13 Desember 2025	Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.
29	Bimbingan Teknis Kepegawaian	Sekretariat Mahkamah Agung RI	Secara Virtual melalui zoom meeting Tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan 18 Desember 2025	Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.

4

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum, pada Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Fakfak mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional, administrasi, serta penyelenggaraan tugas dan fungsi peradilan, yakni:

Pertama DIPA yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Mendapat alokasi anggaran Belanja Pegawai dan belanja Barang dan Belanja modal diawal tahun 2025 dengan total anggaran sebesar **Rp. 6.412.904.000,-** (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*), dan diakhir tahun 2025 menjadi **Rp. 6.651.523.000,-** (*Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Dalam kurun waktu tahun 2025 telah melakukan 17 (Tujuh Belas) kali revisi yaitu:

1. Revisi I tanggal 4 Februari 2025, perubahan RPD;
2. Revisi II tanggal 23 Februari 2025, Pencantuman /Penghapusan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
3. Revisi III tanggal 10 Maret 2025, Pencantuman /Penghapusan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
4. Revisi IV tanggal 23 Maret 2025 : Pencantuman /Penghapusan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
5. Revisi V tanggal 17 April 2025, Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III Dipa. Dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK;

6. Revisi VI tanggal 28 Mei 2025, penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional; pergeseran anggaran antara KRO dan atau antar kegiatan; pergeseran anggaran antar satker;
7. Revisi VII tanggal 10 Juli 2025, Pemutakhiran Rencana Penarikan dana halaman III Dipa;
8. Revisi VIII tanggal 22 Juli 2025, Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (Pagu Anggaran Unit Organisasi tetap dan Pagu Anggaran Antar-Satker berubah); - Revisi Administrasi.
9. Revisi IX tanggal 14 Agustus 2025, Revisi Pemutahiran POK
10. Revisi X tanggal 29 Agustus 2025,
 - Pergeseran Anggaran Antar-Satker
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
11. Revisi XI tanggal 29 September 2025,
 - Revisi perubahan pergeseran hal pagu tetap dan administrasi
 - Pergeseran anggaran antar satker dan perubahan halarnan III DIPA
12. Revisi XII tanggal 8 Oktober 2025, Perubahan halaman III DIPA, dan Pemutakhiran POK
13. Revisi XIII tanggal 24 Oktober 2025, Pencantuman/ Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
14. Revisi XIV tanggal 28 Oktober 2025,
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
15. Revisi XV tanggal 14 November 2025,
 - Pemenehan Belanja Operasional;
 - Pemenuhan Belanja Operasional;
 - Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional Pergeseran Anggaran Minus Belanja Pegawai Operasional
 - Pergeseran Anggaran Antar- Satker

16. Revisi XVI tanggal 24 November 2025, Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

17. Revisi XVII tanggal 12 Desember 2025, Pemutakhiran Data POK

Kedua, DIPA yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah agung dengan dapat alokasi anggaran Belanja Barang dengan total anggaran sebesar **Rp Rp 61.774.000,-** (*Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Dalam kurun waktu tahun 2025 telah melakukan 9 (Sembilan) kali revisi yaitu:

1. Revisi I tanggal 22 Februari 2025,
 - Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
 - 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
2. Revisi II tanggal 10 Maret 2025
Pencantuman/ Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
3. Revisi III tanggal 21 Maret 2025,
Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
4. Revisi IV tanggal 17 April 2025,
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5. Revisi V tanggal 10 Juli 2025
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
6. Revisi VI tanggal 9 Oktober 2025 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
7. Revisi VII tanggal 24 Oktober 2025
 - Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya
 - Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)

8. Revisi VIII tanggal 8 November 2025

- Penambahan / Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional
- Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau PERkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA

9. Revisi IX tanggal 28 November 2025

- Revisi Administratif
- Perubahan RPD pada Halaman III DIPA Pemutakhiran Data POK

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pengelolaan Keuangan Pada DIPA 01 untuk Tahun 2025 dari Pagu sebesar **Rp. 6.651.523.000,-** (Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Liman Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan Anggaran **Rp. 6.142.659.502,-** dengan persentase sebesar **92.35%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2025 telah melakukan 17 (Tujuh) kali revisi dari Kanwil DJPB dan DJA.

Pengelolaan dan penyerapan/ realisasi pada masing – masing akun belanja dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2025 Pagu awal sebesar **Rp.3.863.060.000,-** Penyerapan belanja Pegawai sampai akhir 2025 adalah sebesar Rp. **3.354.825.437,-** dengan persentase sebesar **86.84%**.

Tabel IV.1.1.1 Realisasi Belanja Pegawai

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,003,379,000,-	926,438,280,-	92.63	73,940, 720,-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,000,-	13,052,-	12.917	24,083
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	87,950,000,-	70,508,510,-	80.17	17,441,490,-
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	27,561,000,-	20,130,564,-	73.04	7,430,436,-
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	48,140,000,-	14,420,000,-	29.95	0
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56,140,000,-	27,990,000,-	49.86	28,150,000,-

511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	42,670,000,-	4,557,955,-	10.68	38,112,045,-
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	103,030,000,-	57,051,580,-	55.37	45.978.420,-
511129	Belanja Uang Makan PNS	163,740,000,-	160,768,000,-	98.18	2,972,000,-
511138	Belanja tunjangan Khusus Papua PNS	209,320,000,-	145,050,000,-	69,3	64,270,000,-
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44,825,000,-	13,460,000,-	30,03	31,365,000,-
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	216,000,000,-	196,800,000,-	91.11	19,200,000,-
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	236,301,000,-	212,076,484,-	89,76	24,224,516,-
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,450,560,000,-	1,336,400,000,-	92,13	114,160,000,-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	111,200,000,-	111,192,000,-	99,99	8,000,-
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000,-	1,904	63,47	1,096,-
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,128,000,-	5,125,760,-	99,96	2,240,-
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,550,000,-	1,537,728,-	99,21	12,272,-
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,780,000,-	5,777,620,-	99,96	2,380,-
511628	Belanja Uang Makan PPPK	28,746,000,-	20,601,000,-	71,67	8,145,000,-
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	14,400,000,-	14,400,000,-	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,600,000,-	6,600,000,-	100	0
Jumlah		3,863,060,000,-	3,354,825,437,-	86,82	509,159,698

b. Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2025 pagu awal sebesar Rp.2.187.463.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 2.186.834.125,- yang merupakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Realisasi penyerapan belanja barang sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar **99.97%**.

Tabel IV.1.1.2 Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	744,430,000,-	744,359,600,-	99,99	70,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000,-	30,000,000,-	100	0
521115	Belanja Honor Oprasioanal Satuan Kerja	60,720,000,-	34,560,100,-	99,97	12,000,-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18,180,000,-	18,180,000,-	100	0
521252	Belanja Barang Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)	700,000,-	700,000,-	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,867,000,-	60,867,000,-	100	0
522112	Beban Langganan Telpon	480,000,-	376,975,-	78,54	103,025
522113	Beban Langganan Air	12,000,000,-	11,999,600,-	100	400

522141	Belanja Sewa	25,790,000,-	25,790,000,-	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	720,000,-	720,000,-	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	955,343,000,-	954,900,050,-	99,95	442,950
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya	66,483,000,-	66,482,900,-	100	100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	163,592,000,-	163,592,000,-	100	1
524111	Belanja Perjalanan Biasa	73,806,000,-	73,806,000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000,-	1,200,000,-	100	0
JUMLAH		2.188.463.000,-	2,187,834,125,-	99.97%	628,875,-

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar **Rp 600.000,-** yang diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana pendukung kebutuhan kantor, berupa 1 (satu) unit **Generator Listrik (Genset)** dan pada tahun 2025 telah terealisasi pengadaan tersebut mencapai **100%**.

Tabel IV.1.1.3 Realisasi Belanja Modal

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Genset)	600,000,000	600,000,000	100	0
JUMLAH		600,000,000	600,000,000	100	0

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 merupakan anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Barang selama satu tahun anggaran. Anggaran ini digunakan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, khususnya dalam penanganan perkara, serta menunjang kinerja aparatur yang melaksanakan tugas di bidang tersebut. Pada Tahun Anggaran 2025, DIPA 03 dialokasikan dengan total anggaran sebesar **Rp 56.806.000,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar **Rp 56.580.000,-** dengan tingkat penyerapan mencapai **99.60%**. Dalam

proses pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali revisi anggaran melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB). Rincian Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2025 untuk Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1.2.1 Realisasi Belanja DIPA 03

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
Pos Pelayanan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	29.500.000,-	29.500.000,-	100	0
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan banding yang tepat waktu					
521211	Belanja Pengadaan dan Penjilidan Berkas Perkara	2.550.000,-	2.550.000,-	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.120.000,-	6.120.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	1.250.000,-	1.250.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penetapan Hari Sidang	1.250.000,-	1.250.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat penahanan dan perpanjangan penahanan	2.500.000,-	2.500.000,-	100	0
521211	Belanja Bahan Pemeriksaan Di Pengadilan	5.965.000,-	5.965.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan	1.000.000,-	1.000.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan	1.000.000,-	985.000,-	98.50	15.000,-
521211	Pengadaan dan Penjilidan berkas perkara Minutasi	2.550.000,-	2.550.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan Banding	1.395.000,-	1.395.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan Banding Jaksa/ Terdakwa	342.000,-	342.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan Kasasi dan PK	40.000,-	0,-	00.00	40.00,-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan Kasasi dan PK	342.000,-	171.000,-	50	171,000
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
521211	Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo	360.000,-	360.000,-	100	0
JUMLAH					

3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- a. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut bersumber dari pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), khususnya berupa pendapatan sewa rumah dinas. Selain itu, PNBP juga berasal dari penerimaan kembali atas anggaran tahun sebelumnya, yaitu pengembalian belanja pegawai pada Tahun Anggaran yang lalu. Adapun rincian PNBP yang tercantum dalam DIPA 01 dapat diuraikan sebagai berikut:"

Tabel IV.1.3.1.1 Realisasi PNBP DIPA 01

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			
	425151	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.073.000,-	21.168.124,-
Jumlah			9.073.000,-	21.168.124,-

- b. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 03 (Badan Peradilan Umum)

Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya. Untuk rincian PNBP Dipa 03 diuraikan sebagai berikut:

Tabel IV.1.3.1.2 Realisasi PNBP DIPA 03

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan			
	425231	Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	4.290.000,-	120.000,-
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2.090.000,-	2.450.000,-
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	9.261.000,-	3.331.000,-
Jumlah			15.641.000,-	6.271.000,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Fakfak merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Fakfak selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sorong secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kebutuhan operasional kantor, yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, berupa pengadaan 1 (satu) unit Generator Listrik (Genset) jenis Stationary Generating Set (V GEN/ VG60 – C) sebagai sumber daya listrik cadangan apabila terjadi pemadaman Listrik, yang diadakan sebagai pengganti generator listrik lama yang telah mengalami kerusakan, guna memastikan keberlangsungan aktivitas

perkantoran tetap berjalan secara optimal dan tidak terganggu oleh kendala pasokan listrik.

Tabel IV.2.1.1 Pengadaan Sarana & Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Tahun Pengadaan	*Keterangan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana				
1.	Stationary Generating Set (V GEN/ VG60 – C)	1	Tahun 2025	Telah Terlaksana

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

Tabel IV.2.2.1 Tanah dan bangunan gedung kantor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Tanah dan Gedung Kantor						
1.	Tanah Bangunan Gedung Kantor	1	√			
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	√			
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√			
4.	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	√			
5.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	√			
6.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	√			
7.	Bangunan Penampung Air Baku	1	√			
8.	Pagar Permanen	1	√			

b. Rumah Dinas

Tabel IV.2.2.2 Rumah dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Rumah Dinas						
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			Aset Pemda
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			-
3.	Rumah Dinas Hakim	7	√			-
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	-	√	Butuh Di Renovasi

c. Kendaraan Dinas

Tabel IV.2.2.3 Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Inova	2010	√			
2	Kijang Standart KF 70 SHORT Toyota	2002	√			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda	1992			√	Akan dilakukan penghapusan aset

d. Sarana dan Prasarana Lainnya

Tabel IV.2.2.4 Sarana & Prasarana

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	*KETERANGAN
I	Sarana/ Prasarana Ruangan		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil	1	Baik
3.	Ruang Hakim	1	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6.	Ruang Register	1	Baik
7.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Baik
8.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Baik
9.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
10.	Ruang Juru Sita	1	Baik
11.	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
12.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
13.	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
14.	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
15.	Ruang Perencanaan Teknik Informasi dan Pelaporan	1	Baik
16.	Ruang Sidang Utama (Cendrawasih)	1	Baik
17.	Ruang Sidang Kedua (Kasuari)	1	Baik
18.	Ruang Sidang Anak	1	Baik
19.	Ruang Tahanan (Pria/ Wanita)	2	Baik
20.	Ruang Mediasi	1	Baik
21.	Ruang Arsip	1	Baik
22.	Ruang Laktasi dan Kesehatan	1	Baik
23.	Ruang Mushola	1	Baik
24.	Ruang Humas	1	Baik
25.	Ruang Jaksa	1	Baik
26.	Ruang Posbakum	1	Baik
27.	Ruang Pantri	2	Baik
28.	Ruang Bendahara	1	Baik
29.	Ruang Server	1	Baik
30.	Ruang Penyimpanan Dokumen	1	Baik
31.	Ruang Kasir Perdata	1	Baik
32.	Ruang Bapas, Pengacara dan Pekerja Sosial	1	Baik

33.	Ruang WC Umum	4	Baik
34.	Ruang Aula	1	Baik
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Meja reseptionis	1	Baik
2.	Scaner	2	Baik
3.	Server	1	Baik
4.	Mesin Ketik portable	27	Rusak ringan2 rusak berat 25
5.	Mesin Hitung Listrik	1	Rusak Berat
6.	Portabel Genset	1	Baik
7.	Lemari Penyimpan	7	1 rusak berat ; 6 Baik
8.	Mesin Stensil	5	5 Rusak berat
9.	Lemari Besi/ Metal	28	22 Rusak Berat; 6 baik
10.	Lemari Kayu	24	12 Rusak Ringan; 12 Baik
11.	Rak Kayu	15	15 baik
12.	Filling Cabinet Besi	14	3 rusak berat; 5 baik, 6 Rusak Ringan
13.	Brankas	5	1 Rusak Ringan; 4 Baik
14.	Lemari Display	1	Baik
15.	Lemari Katalog	1	Baik
16.	Papan Visual	21	8 Rusak Ringan; 13 Baik
17.	Buffet	2	Baik
18.	Hand Metal Detector	1	Baik
19.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Baik
20.	Meja Kerja Besi/Metal	57	20 Rusak Ringan ,22 Baik, 15 Rusak Berat
21.	Meja Kerja Kayu	96	9 rusak berat; 87 Baik
22.	Kursi Besi/metal	226	19 Rusak Ringan; 161 Baik, 46 Rusak Berat
23.	Kursi Kayu	24	2 Baik ,4 Rusak Berat
24.	Sice	19	1 Rusak Berat; 18 Baik
25.	Bangku Panjang Besi/metal	36	36 Baik
26.	Bangku Panjang Kayu	50	22 Rusak Ringan, 28 Baik
27.	Meja Rapat	5	Baik
28.	Meja Komputer	4	Baik
29.	Sketsel (Pagar Ruang Sidang)	1	Baik
30.	Kursi Fiber Glas/plastik	4	Baik
31.	Pot Bunga	9	9 rusak berat
32.	Jam Mekanis	10	5 Rusak Rerat, 5 Rusak Ringan
33.	Mesin Pemotong Rumput	2	2 Rusak Berat
34.	Iemari Es	2	2 Rusak Berat
35.	A.c.split	17	17 baik
36.	Kipas Angin	36	2 Baik, 34 Rusak Berat
37.	Televisi	5	Baik
38.	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
39.	Tiang Bendera	6	Baik
40.	Kaca Hias	1	Baik
41.	Dispenser	2	Rusak berat
42.	Palu Sidang	2	Baik
43.	Gordyin/Kray	66	66 rusak berat
44.	Dvd Player	1	Rusak Berat
45.	Compact Disc player (peralatan Studio Audio)	1	Baik
46.	Professional Sound system	1	Baik
47.	Telephone (pabx)	3	1 Baik,2 Rusak Berat
48.	pesawat Telephone	6	6 Rusak Berat
49.	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1 Rusak Berat
50.	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	1 Baik
51.	P.c Unit	24	18 Baik, 6 Rusak Berat
52.	Lap Top	10	8 Baik, 2 Rusak Berat

53.	Note Book	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
54.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	10 Baik
55.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
56.	Portable Air Conditioning (ac)	3	Baik
57.	Instalasi ac	4	4 Rusak Berat
58.	Monografi	15	Baik
59.	Piala	8	Rusak Berat
60.	Piagam	1	Rusak Berat
61.	Mesin Hitung manual	1	Rusak Berat
62.	Papan Pengumuman	1	Baik
63.	Stabilisator	2	Baik
64.	Lambang Instansi	1	Baik
65.	Kursi Dorong	3	Baik
66.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik
67.	Router	1	Baik
68.	Air Conditioning (ac)	2	Baik
69.	Stationary Generating Set (V GEN/ VG60 – C)	1	Baik

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.943 m² senilai Rp. 905,343,000- (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);



Foto Gedung Kantor Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung kantor, dilakukan berbagai upaya untuk menjaga, meningkatkan, serta mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada agar tetap layak, aman, dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Kegiatan pemeliharaan ini tidak hanya mencakup perawatan rutin terhadap bangunan dan fasilitas penunjang, tetapi juga meliputi pekerjaan penataan ulang ruang kerja serta pengembangan area pelayanan publik.

Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pemeliharaan gedung kantor tersebut adalah pekerjaan pelebaran Lobi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Fakfak. Pekerjaan pelebaran ini dilakukan dengan menambah luasan ruang PTSP agar memperoleh space yang lebih luas, representatif, dan nyaman bagi masyarakat pencari keadilan maupun petugas pelayanan. Untuk merealisasikan penambahan ruang tersebut, dilakukan pembongkaran terhadap ruangan Bagian Umum dan Bagian Keuangan yang sebelumnya berada di area tersebut, kemudian dilakukan penataan ulang agar fungsi pelayanan PTSP dapat berjalan secara lebih optimal.



Foto Dokumentasi pengerjaan Pelebaran PTSP

Pengerjaan pelebaran Lobi PTSP ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi serta rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki alur pelayanan, serta menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan yang lebih tertib, efektif, dan efisien.



Foto hasil pengerjaan Pelebaran PTSP

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan Lobi PTSP Pengadilan Negeri Fakfak dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat pelayanan terpadu, memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan, serta mendukung terwujudnya standar pelayanan peradilan yang prima sesuai dengan kebijakan dan arahan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain kegiatan perluasan area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Fakfak, dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor juga dilakukan berbagai pekerjaan pemeliharaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, kenyamanan, keamanan, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna layanan. Kegiatan pemeliharaan tersebut meliputi perbaikan jalur disabilitas guna memastikan terpenuhinya standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara setara dan mandiri.



Foto pembersihan lingkungan kantor



Foto pemeliharaan Jalur disabilitas

Selain itu, dilakukan pula kegiatan pengecatan pada area ruang tahanan sebagai bagian dari upaya perawatan bangunan untuk menjaga kebersihan, kerapian, serta kondisi fisik ruangan agar tetap layak dan memenuhi standar keamanan. Kegiatan pemeliharaan juga

mencakup pemeliharaan lingkungan kantor secara menyeluruh, termasuk penataan dan perawatan area sekitar gedung, kebersihan halaman, serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan representatif.



Dokumentasi foto pengecatan ruang tahanan

Sehubungan dengan pelaksanaan perluasan area PTSP yang dilakukan dengan membongkar ruangan yang sebelumnya digunakan

oleh Bagian Kesekretariatan, maka dilakukan penataan ulang dan perpindahan ruang kerja sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan tata ruang gedung. Dalam hal ini, Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Fakfak melakukan perpindahan ruang kerja dari



Foto ruangan kesekretariatan yang telah pada lantai 2

lantai 1 ke lantai 2, dengan memanfaatkan ruangan bekas Wakil Panitera (Wapan) ruangan bekas Jurusita (JS) dan Ruangan Bekas Perpustakaan. Dimana ruangan Wapan dan ruangan JS digabungkan menjadi satu menjadi ruangan bagian Umum & Keuangan dan ruangan Perpustakaan menjadi ruangan Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan(PTIP). Penyesuaian ini dilakukan agar seluruh fungsi kesekretariatan tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas administrasi.

Selanjutnya, sebagai bagian dari penataan ulang ruang kerja tersebut, Ruangan Perpustakaan di pindahkan pada ruangan Bekas kantor Posbakum yang dekat pada area ruangan tunggu siding dan untuk ruangan Jurusita (JS) direncanakan untuk dipindahkan kembali ke lantai 1 guna mendukung efektivitas koordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis kepaniteraan. Seluruh rangkaian kegiatan penataan dan pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (Rumah Dinas) 11 Unit , 747 m2 Senilai Rp. 66.483.000.- (Enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Foto rumah dinas Hakim

- Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh sarana pendukung operasional kantor dapat berfungsi dengan baik, aman, dan optimal. Pemeliharaan ini mencakup berbagai jenis aset, antara lain pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang mobilitas dan pelaksanaan tugas kedinasan, pemeliharaan alat pengolah data seperti komputer, printer, dan perangkat teknologi informasi lainnya, serta pemeliharaan terhadap inventaris kantor lainnya yang berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan pelayanan.

Seluruh kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku, dengan tujuan memperpanjang masa pakai aset, mencegah kerusakan yang lebih besar, serta menjaga efektivitas dan efisiensi kinerja satuan kerja. Adapun total anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin ini adalah sebesar Rp163.592.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



Foto Pemeliharaan Kendaraan Dinas

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Berdasarkan hasil inventarisasi seluruh aset Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dan terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN pada Pengadilan Negeri Fakfak, diketahui bahwa terdapat beberapa aset BMN yang kondisinya mengalami rusak berat atau rusak parah. Aset-aset tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor, serta tidak lagi memberikan manfaat ekonomis maupun manfaat operasional bagi satuan kerja.

Terhadap BMN yang mengalami rusak parah tersebut, telah dilakukan proses identifikasi secara menyeluruh yang meliputi penentuan jenis barang, jumlah unit, kondisi fisik, serta nilai perolehan maupun nilai buku aset. Seluruh data hasil identifikasi tersebut telah didokumentasikan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk pengusulan tindak lanjut pengelolaan aset. Saat ini, BMN yang dinyatakan rusak parah tersebut sedang dalam proses pengajuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan penghapusan dari daftar inventaris BMN.



Dokumentasi foto Petugas KPKNL yang tengah melakukan Penilaian Aset BMN

Sebagai bagian dari tahapan proses tersebut, pada tahun anggaran berjalan ini, petugas dari KPKNL Sorong telah melakukan kunjungan langsung ke Pengadilan Negeri Fakfak guna melaksanakan penilaian atas aset-aset yang diusulkan untuk penghapusan, termasuk aset dengan nilai 1

(satu) rupiah sebagai bagian dari persiapan penetapan status penggunaan dan penghapusan BMN. Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses penetapan status dan penghapusan BMN yang kemudian dicatat dan diproses melalui sub menu penghapusan pada aplikasi SIMAK-BMN, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Fakfak bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Negeri Fakfak telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.pn-fakfak.go.id. Dalam website ini Pengadilan Negeri Fakfak menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Fakfak baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya. Adapun perkembangan dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan peradilan selanjutnya adalah adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan aplikasi e-court.

1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Fakfak

E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online . Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut: Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM), Dokumen Persidangan, Pemanggilan Elektronik (e-Summons), Link E-Court Mahkamah Agung RI e-court

Layanan e-court ini merupakan layanan baru yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dan diterapkan diseluruh jajaran pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Fakfak. Dalam pengimplemetasiannya layanan e-court pada Pengadilan Negeri Fakfak menggunakan perangkat teknologi informasi dan alat pengolah data untuk mendukung pengoperasian layanan e-court di Pengadilan Negeri Fakfak yaitu:

Tabel IV.3.1 Perangkat pendukung e-court

PERANGKAT PENDUKUNG E-COURT			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
P.C. Unit	HP AIO PROONE 600 G5 (I5, 4GB,1 TB, WIN10,21.5IN)	1	Unit
UPS P.C. Unit	APC Back-UPS BX 1400U-MS	1	Unit
Server	Fujitsu TX1330M4 (Intel Xeon E-2134,32GB, 2x, 1TB)	1	Unit
Rak Server	Indorack 19" Rack Server Ir9020g	1	Unit
E-court corner	Vestouch InteractiveAndroid Kiosk 21,5 inch	1	Unit

Tahun 2025, Pengadilan Negeri Fakfak menerima 102 pengguna Layanan e-court, berikut Implementasi Layanan e-court yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Fakfak:

Tabel IV.3.2 Perkara Pengguna e-court Pengadilan Negeri Fakfak

DAFTAR PERKARA ECOURT		
No.	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Gugatan	15
2.	Gugatan Sederhana	5
3.	Permohonan	65
4.	e-Litigasi	7

e-Court
EDWIN TANPATU, S. Soc., S.H.
(Pemeriksa/Manajemen Perkara)

Daftar Gugatan Online

Daftar Perkara & Pendaftaran Perkara

Q Cari Nomor Gugatan Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Filter: 10 - 10000 Search

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Pengantar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN FFA-20192025MAGN 28 Oktober 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 8 Desember 2025	Rp. 825.000	05/Pdt.G.0025/PN FFA 30 Oktober 2025
2	PN FFA-01502025RHH 13 Oktober 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 24 November 2025	Rp. 825.000	14/Pdt.G.0025/PN FFA 14 Oktober 2025
3	PN FFA-071602025L2 7 Oktober 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 30 November 2025	Rp. 825.000	03/Pdt.G.0025/PN FFA 9 Oktober 2025
4	PN FFA-081002025BIB 6 Oktober 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar	Rp. 825.000	02/Pdt.G.0025/PN FFA 7 Oktober 2025

e-Court
EDWIN TANPATU, S. Soc., S.H.
(Pemeriksa/Manajemen Perkara)

Daftar Gugatan Sederhana Online

Daftar Perkara & Pendaftaran Perkara

Q Cari Nomor Gugatan Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Filter: 10 - 10000 Search

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Pengantar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN FFA-001002025GIV 9 Desember 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Meringga Pendaftaran	Rp. 410.000	Selanjutnya
2	PN FFA-001002025GIV 9 Desember 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Meringga Pendaftaran	Rp. 410.000	Selanjutnya
3	PN FFA-001002025GIV 9 Desember 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Meringga Pendaftaran	Rp. 410.000	Selanjutnya
4	PN FFA-001002025GIV 9 Desember 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Meringga Pendaftaran	Rp. 410.000	Selanjutnya
5	PN FFA-001002025GIV 9 Desember 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Meringga Pendaftaran	Rp. 410.000	Selanjutnya

e-Court
EDWIN TANPATU, S. Soc., S.H.
(Pemeriksa/Manajemen Perkara)

Daftar Permohonan Online

Daftar Perkara & Pendaftaran Perkara

Q Cari Nomor Permohonan Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Filter: 10 - 10000 Search

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Pengantar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN FFA-20112025TDA 24 November 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 5 Desember 2025	Rp. 410.000	06/Pdt.P.0025/PN FFA 24 November 2025
2	PN FFA-07112025BIB 7 November 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 10 November 2025	Rp. 410.000	04/Pdt.P.0025/PN FFA 10 November 2025
3	PN FFA-23102025BIB 30 Oktober 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 30 Oktober 2025	Rp. 410.000	03/Pdt.P.0025/PN FFA 30 Oktober 2025
4	PN FFA-071002025BIB 17 Oktober 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 24 Oktober 2025	Rp. 410.000	02/Pdt.P.0025/PN FFA 30 Oktober 2025
5	PN FFA-141002025BIB 14 Oktober 2025	Sudah Dibayar (Dibayarkan kemudian)	Perkara Terselar - Perkara Tanggal Putusan : 24 Oktober 2025	Rp. 410.000	01/Pdt.P.0025/PN FFA 10 Oktober 2025

Tampilan Detail Pendaftaran/dokumen Persidangan e-court Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Implementasi Layanan e-court corner



Tampilan salah satu Pengunjung yang menggunakan perangkat baru layanan e-court corner Pengadilan Negeri Fakfak

❖ Implementasi Pengenalan ecourt pada pengunjung pengadilan



Menampilkan video pengenalan dan penjelasan tentang e-court di ruang tunggu Pengadilan Negeri Fakfak

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Fakfak

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Aplikasi SIPP ini secara terus menerus disempurnakan, dimana aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 6.0.1 Perangkat teknologi informasi dan alat pengolah data untuk mendukung pengoperasian aplikasi SIPP di Pengadilan Negeri Fakfak yaitu :

Tabel IV.3.2.1 Perangkat pendukung SIPP

Perangkat Pendukung SIPP			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server	Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb	1	Unit
	2x 4GB DR3-1600 ECC		
	Independent Mode Installation		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	2x 300GB SAS ^G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
Aplikasi SIPP	Versi 5.6.4	1	Aplikasi

Pengadilan Negeri Fakfak memiliki Website dengan alamat : www.pn-fakfak.go.id dalam halaman website tersebut ditampilkan informasi-informasi terkait Pengadilan Negeri Fakfak sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan Informasi kepada pencari informasi tanpa harus datang

langsung. Untuk penelusuran Perkara / pencarian informasi perkara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Fakfak, masyarakat juga dapat mengaksesnya pada website Pengadilan Negeri Fakfak, melalui Menu INFO PERKARA, sedangkan untuk mencari Jadwal sidang pada Menu JADWAL SIDANG.

Berikut tampilan-tampilan Menu pada Website dan Implementasi SIPP di Website Pengadilan Negeri Fakfak.

NO	NO PERKARA	TERDAKWA/PIRAK	RUANGAN	AGENDA	JENIS PERKARA
1.	W/Pak.G/2025/PN.FK	1. Corneus Hombori 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPPN) Cabang Sorong 3. Wakil Pembangutan Daerah Papua Cabang Fakfak 4. Muhammad Yusuf Suali	RUANG SIDANG UTAMA	Pembacaan Putusan Majelis Hakim	Pembuatan Melawan Hukum
2.	W/Pak.G/2025/PN.FK	MUHAMMAD FAUZY MUSA'AD	RUANG SIDANG UTAMA	Pembacaan Putusan melalui e-Court	Pembuatan Melawan Hukum

Tampilan Menu Jadwal Sidang Online pada Website Pengadilan Negeri Fakfak

No	Nomor Perkara	Tanggal Pengajuan	Status Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Jumlah Putusan
1	W/Pak.G/2025/PN.FK	12 Dec 2025	Pembatalan Perkara	Pengadu/Petisi: Rikman Tinkard Effendi Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan dengan Hukum	Pembatalan Berkeputusan Hakim	15 Putusan
2	W/Pak.G/2025/PN.FK	12 Dec 2025	Pembatalan Perkara	Pengadu/Petisi: Rikman Tinkard Effendi Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan dengan Hukum	Pembatalan	12 Putusan
3	W/Pak.G/2025/PN.FK	12 Dec 2025	Pembatalan	Pengadu/Petisi: Rikman Tinkard Effendi Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan dengan Hukum	Pembatalan	12 Putusan
4	W/Pak.G/2025/PN.FK	12 Dec 2025	Pembatalan Perkara	Pengadu/Petisi: Rikman Tinkard Effendi Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan dengan Hukum	Pembatalan	12 Putusan
5	W/Pak.G/2025/PN.FK	12 Dec 2025	Pembatalan	Pengadu/Petisi: Rikman Tinkard Effendi Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan dengan Hukum	Pembatalan	12 Putusan

Tampilan Menu Penelusuran Perkara pada Web <https://sipp.pn-fakfak.go.id/>

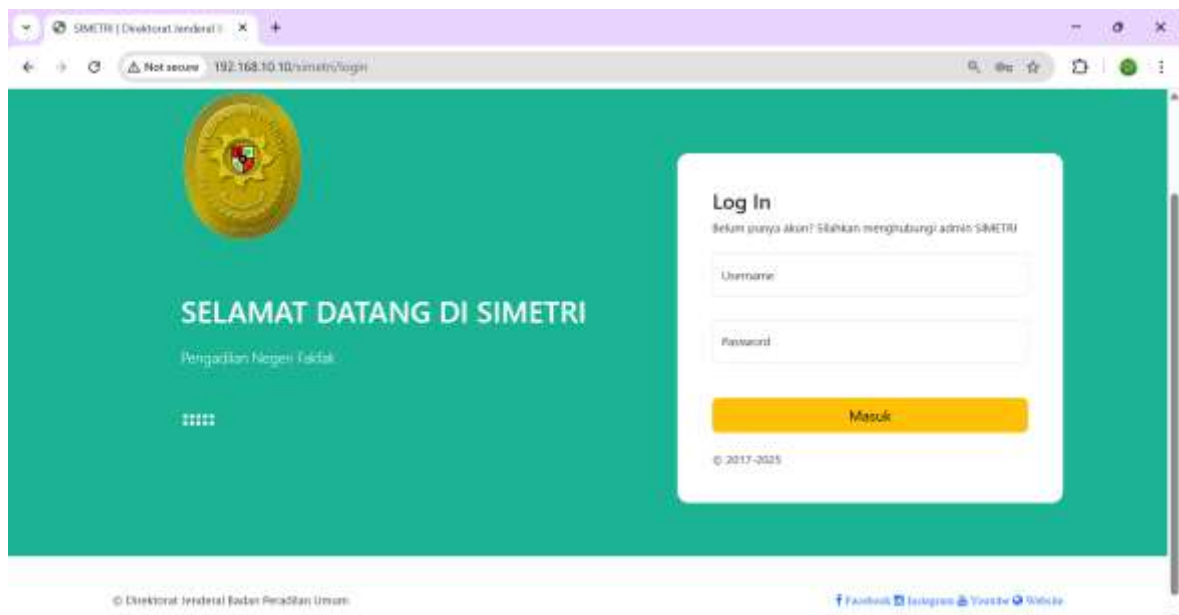


3. Implementasi SIMETRI di Pengadilan Negeri Fakfak

Pada awal penerapannya, sistem persuratan di Pengadilan Negeri Fakfak masih menggunakan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+). Aplikasi PTSP+ tersebut digunakan sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan administrasi persuratan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan peradilan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih terintegrasi, pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak mulai menerapkan perubahan dalam sistem persuratan yang digunakan. Perubahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan Nomor 1151/DJU/SK.TI1.1.1/VIII/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi (SIMETRI) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan seluruh satuan kerja peradilan yang berada di bawahnya.

Penerapan aplikasi SIMETRI ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi persuratan secara elektronik, mulai dari pencatatan, pengelolaan, hingga pemantauan dokumen, sehingga dapat mendukung tata kelola administrasi peradilan yang lebih modern, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, aplikasi SIMETRI terus mengalami pengembangan dan penyempurnaan sistem guna menyesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja peradilan. Saat ini, aplikasi SIMETRI yang digunakan pada Pengadilan Negeri Fakfak telah berada pada versi 3.0.6, yang diharapkan mampu memberikan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan administrasi persuratan secara berkelanjutan.



Tampilan Login Aplikasi Simetri

a. Buku Tamu

Pada Tahun 2025, jumlah pengunjung Pengadilan yang menggunakan layanan peradilan tercatat dalam Aplikasi SIMETRI pada menu Register Buku Tamu tercatat sebanyak 177 orang dan pada Aplikasi PTSP+ tercatat pada buku tamu Sebanyak 607 orang. Total tamu yang

berkunjung pada PN Fakfak Pada Tahun 2025 sebanyak 785 tamu.

Register Buku Tamu

#	TANGGAL	NOMOR REGISTRASI	KELOMPOK	NAMA TAMU	KETERANGAN	ACTION
1	15 Desember 2025	173/2025	Pelaksanaan Tergantung Tindak Lanjut	Mahasiswa	Mengunjungi Saluran penerusan informasi - SIMETRIS (2025/12/15)	[Detail]
2	15 Desember 2025	174/2025	Pelaksanaan Tergantung Tindak Lanjut	Tutut La Gila Gila	Substansi: Substansi dari penerusan informasi - SIMETRIS	[Detail]
3	15 Desember 2025	175/2025	Pelaksanaan Tergantung Tindak Lanjut	Substansi: Substansi dari penerusan informasi - SIMETRIS	Substansi: Substansi dari penerusan informasi - SIMETRIS	[Detail]
4	12 Desember 2025	176/2025	Pelaksanaan Tergantung Tindak Lanjut	Substansi: Substansi dari penerusan informasi - SIMETRIS	Substansi: Substansi dari penerusan informasi - SIMETRIS	[Detail]
5	15 Desember 2025	177/2025	Pelaksanaan Tergantung Tindak Lanjut	Substansi: Substansi dari penerusan informasi - SIMETRIS	Substansi: Substansi dari penerusan informasi - SIMETRIS	[Detail]

Tampilan Buku Tamu Aplikasi Simetri

b. Surat Masuk

Pada Tahun 2025, Surat Masuk dalam Layanan Pengadilan dan tercatat pada Aplikasi SIMETRI menu Surat Masuk berjumlah **482 Surat Masuk**

Register Surat Masuk

#	TANGGAL	NOMOR ASASDA	ISI SURAT	PENGIRIM	STATUS	PELAKSANA	WAKTU	ACTION
1	18 Desember 2025	475/2025	Surat ID	SPK RI BAHAM	Pengiriman	Pelaksanaan oleh: Nita KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	4 Hari	[Detail]
2	18 Desember 2025	480/2025	Surat ID	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	Dikawatirkan	Pelaksanaan oleh: NITA KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	8 Hari	[Detail]
3	18 Desember 2025	481/2025	Surat ID	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	Dikawatirkan	Pelaksanaan oleh: NITA KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	8 Hari	[Detail]
4	18 Desember 2025	482/2025	Surat ID	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	Dikawatirkan	Pelaksanaan oleh: NITA KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	8 Hari	[Detail]
5	18 Desember 2025	483/2025	Surat ID	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	Dikawatirkan	Pelaksanaan oleh: NITA KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	8 Hari	[Detail]
6	18 Desember 2025	484/2025	Surat ID	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	Dikawatirkan	Pelaksanaan oleh: NITA KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	8 Hari	[Detail]
7	18 Desember 2025	485/2025	Surat ID	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	Dikawatirkan	Pelaksanaan oleh: NITA KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	8 Hari	[Detail]
8	18 Desember 2025	486/2025	Surat ID	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	Dikawatirkan	Pelaksanaan oleh: NITA KURNIAWATI, S.H. (Pengantar: Nita KURNIAWATI)	8 Hari	[Detail]

5

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dimulai dari Tahun 2016, Pengadilan Negeri Fakfak mencoba melakukan perubahan pola pikir aparatur dalam bidang Standar Pelayanan Publik dan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Fakfak. Perubahan baik didalam dan luar gedung Pengadilan Negeri Fakfak dan inovasi-inovasi pelayana publik direncanakan dan dilakukan. Seiring dengan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Fakfak untuk mendukung visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama dalam hal mutu pelayanan pengadilan.

Dengan sangat membanggakan Pengadilan Negeri Fakfak berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat "A" (Excellent) dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dengan Nomor:

TAPM.157/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 yang diserahkan pada Tanggal 29 November 2017 di Makassar. Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar

pelayanan publik dan meningkatnya lebih lagi dimasa depan baik dalam hal layanan publik dan kinerja aparatur yang ada didalamnya



Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat



Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib

administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dan sebagai Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan **Assesment Surveillance yang pertama** ditahun 2025 pada



tanggal 14 -16 Mei 2025 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Papua Barat;
Dan Evaluasi dari Akreditasi Pengadilan Negeri Fakfak, telah dilakukan
Assesment Surveillance yang kedua ditahun 2025 pada tanggal 16 - 18
Oktober 2025 oleh Tim Assesmen Pengadilan Tinggi Papua Barat.



Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Fakfak kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil meraih Penghargaan AMPUH dengan predikat Unggul. Penghargaan prestisius tersebut diterima dalam acara Penyerahan Penghargaan Kinerja Pengadilan dan Abhinaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja terbaik satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen kuat Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang prima, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan bagi masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras, sinergi, dan dedikasi seluruh jajaran pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Fakfak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai

integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan.



Dengan diraihnya Penghargaan AMPUH berpredikat Unggul ini, Pengadilan Negeri Fakfak diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja serta inovasi pelayanan peradilan, sekaligus

menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan badan peradilan yang agung, modern, dan terpercaya di masa yang akan datang.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

A. Historis dan Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Fakfak

Pengadilan Negeri Fakfak (selanjutnya disebut PN Fakfak) sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Secara ideal, sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran Visi PN Fakfak, yakni “Terwujudnya Pengadilan Negeri Fakfak Yang Agung”, dan dalam upaya mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi PN Fakfak yang sinergi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja melalui Akreditasi Penjaminan Mutu dan pembentukan 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi (RB).

PN Fakfak sangat menjunjung tinggi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Maksud dari asas

tersebut adalah memberikan suatu pelayanan bagi pencari keadilan baik itu dari segi pelayanan hukum maupun dari segi pelayanan publik. Dalam upaya untuk mencapai Visi, Misi dan pelayanan publik yang nyaman, transparan dan cepat sebagaimana dorongan Akreditasi Penjaminan Mutu dan bagian dari area pelayanan publik pada Reformasi Birokrasi, PN Fakfak telah berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dari sistem layanan Loker Terpadu pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan per periode Tahun 2017, yang telah diaudit Kinerja dan Integritas oleh Badan Pengawasan MA RI pada awal Oktober 2017 dan telah pula diaudit Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Auditor TAPM Badilum MA RI dengan hasil 'A *Excellent*', Loker Pelayanan Terpadu yang dibuat PN Fakfak pada dasarnya sama dengan konsep PTSP, akan tetapi sesuai arahan pimpinan Auditor dan memperhatikan arahan Dirjen Badilum MA RI untuk mengupayakan seluruh satker peradilan umum untuk membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka PN Fakfak telah mendukung kebijakan tersebut, sehingga berupaya keras memindahkan konsep loker terpadu yang telah ada menjadi meja layanan terpadu dalam bentuk *One Gate Integrated Service* atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut dengan PTSP).

Sebagaimana digariskan dalam konsep pelayanan terpadu sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, PTSP bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses pelayanan pengadilan melalui satu pintu, dan memangkas birokrasi pelayanan yang begitu panjang dan berbelit-belit. Selain itu PN Fakfak memandang PTSP dirancang untuk mengurangi interaksi langsung antara para aparatur Pengadilan dengan para pencari keadilan maupun pihak yang berkepentingan, serta memberikan pelayanan yang prima dan mengedepankan transparansi peradilan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga dapat mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Beberapa konten dan fasilitas PTSP yang telah disiapkan PN Fakfak pada saat peluncuran antara lain sesuai dengan perencanaan adalah sebagai berikut:

- ✓ Loker Layanan Terpadu yang saat ini masih berjalan, maupun PTSP PN Fakfak yang akan segera diluncurkan (*launching*) secara keseluruhan diawasi dengan kamera CCTV. Ini merupakan salah satu dari sekian ruangan PN Fakfak yang diawasi oleh CCTV, sehingga pelayanan PTSP termonitor dan terekam sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepan serta mencegah praktek kecurangan dalam melayani publik.
- ✓ Untuk memberikan layanan kepada kaum disabilitas dan masyarakat lainnya yang tergolong prioritas (lansia, dan ibu hamil), PTSP PN Fakfak terhubung dengan akses disabilitas, dan prioritas layanan bagi (disabilitas, lansia, dan ibu hamil) beserta kursi ruang tunggu prioritasnya. Akses prioritas tersebut pada PTSP PN Fakfak terkoneksi dengan mudah dari Area Parkir, terhubung melalui akses jalan difabel menuju gedung PN Fakfak (Meja PTSP) hingga ruang sidang dan Toilet Khusus Difabel, dengan begitu mudah dan nyaman.
- ✓ Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan, PTSP PN Fakfak juga menyediakan minuman dingin dan/atau minuman biasa berupa air mineral, serta permen untuk setiap tamu / pengunjung.
- ✓ Untuk meningkatkan pengetahuan secara mandiri, dalam ruang PTSP telah disiapkan beberapa pamflet kecil yang bisa diambil pengunjung/tamu, berisikan konten-konten inovasi, informasi dan layanan PN Fakfak² termasuk didalamnya upaya PN Fakfak dalam membangun akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai tindakan konkrit atas misi PN Fakfak dalam bentuk pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- ✓ Adanya 1 (satu) layar TV LED flat dengan kualitas 4K 50 inch, yaitu layar TV akan menampilkan informasi terkini (*update*) dan himbauan kepada masyarakat yang bersifat mendidik dan kesadaran hukum.

- ✓ Untuk memudahkan PN Fakfak mengevaluasi pelayanan, kinerja serta sarana prasarana, pada Meja PTSP disiapkan kuesioner manual, dan kedepan akan disiapkan kuesioner secara elektronik yang lebih mudah dan cepat sehingga akumulasi data dapat diolah.
- ✓ Dalam upaya memitigasi resiko kebakaran dan orang sakit mendadak, PTSP pada Meja Layanan Informasi dilengkapi alat pemadam kebakaran (APAR) dan kursi roda serta Kotak P3K, yang mana seluruh personil telah diberikan pelatihan menghadapi bencana alam, huru hara, pertolongan pertama atas kecelakaan, dan kebakaran.



Konsep Perencanaan 3D

Meja Layanan Kepaniteraan (Panmud Pidana, Perdata, dan Hukum) dan Meja Layanan Kesekretariatan (Bagian Umum dan Keuangan)

Namun demikian, tidak berarti pelayanan yang mengedepankan ekselensi dan transparansi tidak berjalan, dan para pencari keadilan tidak dapat memasuki ruangan kepaniteraan maupun kesekretariatan tanpa seizin dari pimpinan masing-masing bagian tersebut. Karena area tersebut merupakan Area Terbatas (*Restricted Public Area*), sebagaimana Ketua PN Fakfak telah menetapkan dalam SK Ketua perihal 3 (tiga) zona pada area PN Fakfak, yaitu Zona Publik, Zona Terbatas (*Restricted Public Area*), dan Area Terotorisasi (*Authorized Person Only*).



Foto Petugas PTSP

Desain kaca grafir yang mengedepankan kearifan lokal yang ditempatkan pada area sisi kanan dan sisi kiri PTSP. Adapun gambar sisi kanan mendeskripsikan bahwa PN fakfak berada diatas tanah Papua dengan kemilau emas, hutan, burung cenderawasih, buah pala dan pala serta tifa khas Fakfak, sedangkan sisi kiri menggambarkan PN Fakfak yang berada di Provinsi Papua Barat memiliki ciri khas adanya burung kasuari, serta adanya tungku dengan tiga batu yang mengilustrasikan kondisi sosial masyarakat Fakfak dikenal dengan 'satu tungku tiga batu', yaitu kerukunan umat beragama, serta kondisi geografis Kabupaten Fakfak yang meliputi bentangan bukit-bukit dan laut yang indah beserta kapal nelayan.

❖ Akses Menuju PTSP (Layanan Prioritas)



Parking lot khusus Prioritas (Difabel, Lansia dan Ibu Hamil) dan jalur khusus



(wheel chair line) serta dilengkapi jalur akses petunjuk bagi kaum buta menuju PTSP



Kursi khusus Prioritas dalam Ruang Tunggu PTSP PN Fakfak

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. MEJA INFORMASI

1. *Sarana dan Prasarana meja pelayanan meja informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.*

Meja informasi merupakan garda depan pelayanan suatu Pengadilan, Pelayanan di meja informasi akan sangat menentukan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Meja informasi Pengadilan Negeri Fakfak saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meja informasi Pengadilan Negeri Fakfak terdapat satu buah laptop untuk mendukung penginputan pemohon informasi dan



data tamu, dua buku agenda untuk data pemohon informasi dan data tamu Pengadilan.

Bagi pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Fakfak untuk mendapat informasi, akan diarahkan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu kemudian petugas meja informasi akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Dan pada lobi Pengadilan Negeri Fakfak juga sudah dilengkapi dengan TV menampilkan video-video pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak.



Foto Petugas meja Informasi

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah meja pelayanan informasi publik yang terdiri dari :

Tabel V.3.1.1 Fasilitas layanan informasi

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Meja Informasi	1 Unit	Baik
2.	Kursi	2 Unit	Baik
3.	Komputer	1 Unit	Baik

2. Sumber Daya Manusia.

Dalam pengelolaan meja informasi, sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 35/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ditunjuk beberapa nama, yaitu:

Tabel V.3.2.1 Petugas PTSP

No.	Nama	Jabatan	Kewenangan
1.	Yeni Anggraini, S.Sos	PPPK	Petugas Meja Umum
2.	Robertho Tawirasaru, SH	PPPK	Petugas Meja Pidana
3.	Ratna Keley, A.Md	PPPK	Petugas Meja Hukum
4.	Thomas Wiratraur, S.H	PPPK	Petugas Meja Perdata
5.	Oktoviana T. Watto, S.H.	PPPK	Petugas Meja Informasi

3. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Fakfak dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Fakfak.

4. Data Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2025, Pengunjung Pengadilan Negeri Fakfak yang menggunakan Pelayanan Informasi Publik adalah **604 Orang/Pengunjung**.

Tabel V.3.4.1 Data pelayanan informasi publik

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	343	15 Menit	343	-	-	-	-	-
Kepegawaian	3	15 Menit	3	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	24	15 Menit	24	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	10	15 Menit	10	-	-	-	-	-
Lainnya	224	15 Menit	224	-	-	-	-	-
TOTAL	604	15 Menit	604	-	-	-	-	-

5. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Data Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2025 NIHIL.

Tabel V.3.5.1 Data penyelesaian sengketa informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. MEJA PENGADUAN

Penanganan Pengaduan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bertanggung jawab dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Proses penanganan pengaduan ini meliputi tahapan penerimaan pengaduan dari masyarakat, pencatatan secara tertib dan akurat, penelaahan awal terhadap substansi pengaduan, serta penyaluran pengaduan kepada pihak atau unit kerja yang berwenang.

Selanjutnya, dilakukan proses konfirmasi dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran serta kelengkapan informasi yang disampaikan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari rangkaian proses tersebut dituangkan dalam bentuk pelaporan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindak lanjut yang diperlukan.



Sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, telah disediakan dan ditempatkan meja khusus pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk

menyampaikan pengaduan, keluhan, kritik, maupun saran terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak. Meja pengaduan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi antara masyarakat dan pengadilan.

Seluruh rangkaian penanganan pengaduan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, keterbukaan, dan kerahasiaan, serta diakhiri dengan pengarsipan dokumen pengaduan secara tertib sebagai bahan dokumentasi, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Fakfak.

1. Data Pelayanan Pengaduan

Data Pelayanan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 NIHIL.

Tabel V.3.6.1 Data pelayanan pengaduan

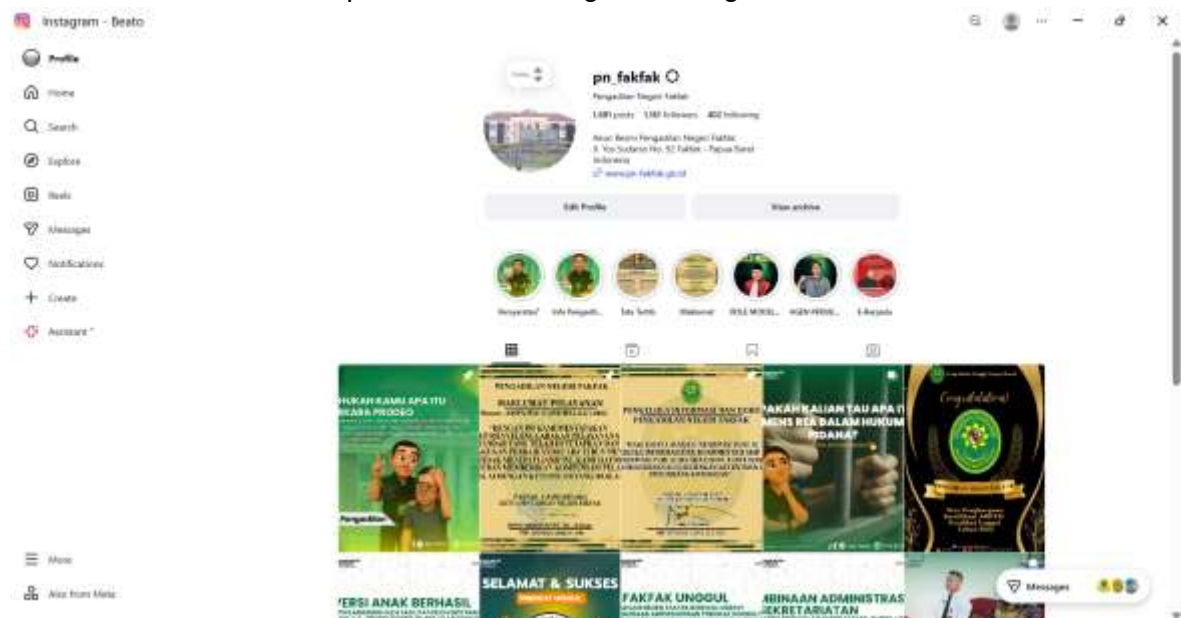
NO.	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	PENYALURAN	PEMERIKSA	PROSES PENANGANAN TERAKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

C. MEDIA SOSIAL PENGADILAN NEGERI FAKFAK

sebagai inovasi, Pengadilan Negeri Fakfak menampilkan Layanan-layanan serta informasi terbaru Pengadilan Negeri Fakfak yang dapat diakses melalui website pn-fakfak.go.id, Facebook Pengadilan Negeri Fakfak, Instagram @pn_fakfak, dan Tiktok @pnfakfak



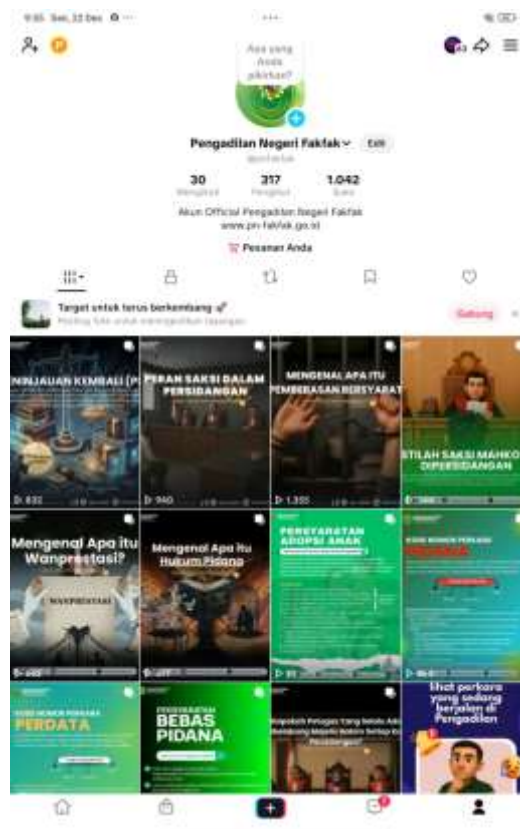
Tampilan Website Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Instagram Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Facebook Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Akun Tiktok Pengadilan Negeri Fakfak

D. ERATERANG

Eraterang merupakan salah satu inovasi media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Fakfak. Inovasi ini telah diterapkan di Pengadilan Negeri Fakfak sejak 1 Juli 2019, sebagai salah satu wujud pelayanan publik yang efisien. Inovasi pelayanan publik ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Fakfak.



Tampilan eraterang pada website Pengadilan Negeri Fakfak



Disediakannya Banner promosi tentang layanan eraterang pada pintu masuk Pengadilan Negeri Fakfak

E. VISUALISASI BERUPA VIDEO UNTUK ALUR PELAYANAN, GRATIFIKASI, DAN INFORMASI TENTANG PENGADILAN

Sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengunjung pengadilan, Pengadilan Negeri Fakfak juga menggunakan inovasi dalam peningkatan pelayanan baik penyampaian informasi mengenai e-court dan gratifikasi dalam bentuk tampilan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh pengunjung pengadilan berupa video yang ditampilkan pada TV diarea-area yang bersentuhan dengan pengunjung pengadilan.



Tampilan Video pada LCD Loby Pengadilan Negeri Fakfak



Tampilan Video Anti Gratifikasi Di Video Tron

F. PUBLIC CAMPAIGN

Salah satu inovasi pelayanan public dengan menyelenggarakan kegiatan promosi pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak kepada Masyarakat kabupaten Fakfak dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang bukan hanya sekedar ucapan melainkan melalui Tindakan sosialisasi secara bertatapapan langsung dengan Masyarakat berupa Public Campaign.



Pengadilan Negeri Fakfak Melakukan Public Campaign

G. SIAKTIF (Sistem Informasi Chat Interaktif)

Untuk menjangkau Masyarakat pencari keadilan yang berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri Fakfak dan memudahkan mencari informasi tentang pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak melalui chat interaktif yang berkolaborasi dengan aplikasi WhatsApp.

PENGADILAN NEGERI FAKFAK

KINI HADIR LAYANAN INFORMASI TERBARU DARI PENGADILAN NEGERI FAKFAK

SIAKTIF (SISTEM CHAT INTERAKTIF)

UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LAYANAN SILAHKAN SCAN BARCODE DIBAWAH INI

0851-6149-6944

Mari Wujudkan Peradilan Yang Modern Berbasis Teknologi Informasi

BISA TERBINA

PENGADILAN NEGERI FAKFAK
Jl. Yos Sudarso No. 92, Kel. Wagon, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak, Papua Barat
Telp. : (0956) 22413 / Fax. : (0956) 22413
E-mail : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

pn-fakfak.go.id
Pengadilan Negeri Fakfak
pn_fakfak
Pengadilan Negeri Fakfak

H. Papedakum

Papedakum merupakan suatu inovasi pelayanan publik dalam membantu kaum rentan terkhusus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara mendampingi dan menemani dengan tujuan agar kaum rentan merasakan aman dan nyaman dalam memberikan keterangan saksi selama proses peradilan langsung.

PAPEDA-KUM
(Pendampingan Perempuan, Anak, dan Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum)

APA ITU Papedakum?
Papedakum merupakan inovasi pelayanan publik dalam membantu kaum rentan khususnya perempuan dan anak dengan memberikan bantuan pendampingan pada saat berhadapan dengan hukum.

SIAPA ITU PENDAMPING?
Pendamping adalah seseorang atau kelompok yang dipercaya memiliki keterampilan untuk mendampingi kaum rentan yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat kaum rentan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

KATEGORI PENDAMPING

- Pakar legal
- Keluarga
- Psikolog
- Psikoter
- Pekerja sosial
- Petugas Pusat pelayanan Terpadu
- Personel hukum
- Pendamping LSM
- Pengetahuan bahasa
- dan orang yang dipercaya oleh kaum rentan untuk melakukan pendampingan

FUNGSI PENDAMPING UNTUK KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi persidangan
- pendamping berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak kaum rentan
- dalam hal diperlukan dan atas izin majelis hakim, pendamping dapat duduk di samping kaum rentan saat persidangan

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN PENDAMPING?
Kaum rentan berhadapan dengan hukum bisa langsung mengajukan kepada hakim/petugas sidang di pengadilan untuk mendapatkan pendamping atau melalui teman atau keluarga yang sudah pernah mengalami persidangan untuk mendapatkan pendamping melalui di pengadilan berhadapan untuk bisa bertemu pada saat persidangan.

HAK-HAK KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Hak memperoleh perlindungan atas kehormatan pribadi
- Hak memperoleh keterangan
- Hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang
- Hak memperoleh pendamping
- Hak diikutsertakan dalam proses
- Hak mendapatkan material hukum
- Hak menyampaikan saksi secara jujur
- Hak mendapatkan restitusi
- Hak atas kompensasi

JANGAN MALU DAN TAKUT MEMBERIKAN SAKSI DI PERSIDANGAN

DASAR HUKUM:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peraturan Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pidana Sex
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Peraturan Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

I. ALUR PENDAFTARAN PERMOHONAN WALI BAGI ANAK

Pendaftaran permohonan wali bagi anak merupakan layanan pengadilan bagi orang tua atau pihak yang berkepentingan untuk memperoleh penetapan wali secara sah. Proses pendaftaran dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menyerahkan surat permohonan dan dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan biaya perkara dibayarkan, perkara akan didaftarkan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga pemohon menerima panggilan persidangan.



J. PERSYARATAN-PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA BAGIAN HUKUM MENGGUNAKAN QR CODE

Pelayanan Persyaratan-Persyaratan Administrasi pada Bagian Hukum menggunakan QR Code merupakan inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi. Melalui pemanfaatan teknologi QR Code, masyarakat maupun perangkat daerah dapat dengan mudah mengakses informasi terkait persyaratan administrasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor atau bertanya secara berulang. Cukup dengan memindai QR Code yang telah disediakan, seluruh informasi persyaratan, alur pelayanan, serta dokumen pendukung dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Inovasi ini diharapkan

mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi penggunaan dokumen cetak, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern, responsif, dan berbasis digital.



6

BAB VI **PENGAWASAN**

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Aparatur Negara, maka Pengawasan Internal sebagai pengendalian harus terus menerus dilakukan oleh Atasan Langsung terhadap bawahan secara preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Pengawasan Atasan Langsung ini paling potensi karena jarak antara obyek dengan subyek pengawasan berjarak dekat sehingga setiap gejala ketimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan demikian tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih dini dan lebih cepat.

Bentuk Pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian atas laporan atau isi dokumen.

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
- c. Pengawasan terhadap Penanganan Pengaduan yang meliputi pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Tahun 2025, Pengadilan Negeri Fakfak, melakukan Pengawasan Rutin oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulannya pada masing-masing Bagian.

a. Pengawasan Bagian Kesekretariatan



Pengawasan Langsung dari Sekretaris



Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan



Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana



Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Umum & Keuangan

b. Pengawasan Bagian Kepaniteraan

Pengawasan Langsung dari Panitera



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Pidana



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Hukum



Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Bagian Perdata



Audit Internal Akreditasi Penjaminan Mutu

c. Pengawasan Hakim Wasmat



Pengawasan oleh Hakim Wasmat ke Lembaga Pemasyarakatan Fakfak

B. EVALUASI

Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Fakfak dilakukan dengan tujuan untuk memonitor dan mengawasi semua kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Diharapkan agar kekurangan atau kesalahan yang ada dapat ditanggulangi dengan cepat.

Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2025 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Fakfak;
2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing – masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.

7

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan tugas dengan baik selama tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, serta dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Fakfak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
- ✓ Berupaya untuk semakin meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Fakfak mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

B. Rekomendasi.

1. Sehubungan dengan adanya aksi anarkis stakeholder (dalam hal ini pengunjung sidang) yang kadang-kadang mengakibatkan kerusakan pada Gedung Pengadilan, maka seyogyanya perlu dilakukannya program penyuluhan hukum kepada masyarakat bersama dengan aparat penegak

hukum lainnya pada waktu mendatang dan dimohonkan agar mendapatkan perhatian dari para pejabat pelaksana terkait. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir aksi anarkis dan sekaligus mempertinggi pemahaman masyarakat tentang hukum dan entitasnya. Kontribusi dana merupakan hal yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari program peyuluhan hukum tersebut.

2. Jika ada penempatan CPNS lagi mohon diperhatikan tempat tinggal CPNS tersebut, karena jika dilihat dari data kepegawaian Pengadilan Fakfak CPNS yang berasal Daerah luar Papua pada saat telah diangkat menjadi PNS akan mengajukan permohonan pindah ke daerah asal dengan alasan kepentingan keluarga, dengan demikian pengisian formasi yang ada menjadi kosong lagi, mengingat pula ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Fakfak mendekati usia pensiun.
3. Pemberdayaan sumber daya manusia Yudisial maupun non Yudisial sangat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan terpusat mengingat selalu ada perubahan-perubahan mendasar yang secara signifikan mempengaruhi kinerja dan harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan akuntabel serta terkait pula dengan penataan dan pengelolaan pelaporan tingkat satuan kerja yang harus dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik dan benar.
4. Salah satu faktor kepindahan Pegawai PN. Fakfak ke PN lain adalah terbatasnya sarana penunjang berupa mess untuk Pegawai. Untuk itu harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung, karena mengingat pegawai PN Fakfak yang berasal dari luar Daerah tinggal di rumah kontrakan, yang apabila dibandingkan dengan pendapatan dan kemahalan pada Kabupaten Fakfak sangat tidak berimbang (pendapatan kecil, tingkat kemahalan tinggi).
5. Seiring dengan tuntutan sebagai pegawai negeri sipil yang erat kegiatannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, maka seyogyanya perlu diberikan dengan pelatihan-pelatihan pada waktu

mendatang. Oleh karena keadaan yang sering terjadi dalam penyelesaian pekerjaan adalah dilakukan sendiri dan/atau belajar dari pihak lain diluar instansi internal (otodidak).